



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

A

Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 5 Agustus 2016 No. 62

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | Dra. HARLINA CHRISMARYANTI, M.M. |
| 2. Jabatan | : | KEPALA SUB BAGIAN - KEUANGAN - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| 3. Alamat Kantor | : | JL. PEMUDA NO. 136, SEMARANG |
| 4. Tanggal Pelaporan | : | 28 Oktober 2014 |

II. DATA HARTA

A. HARTA TIDAK BERGERAK Rp. 0

(TANAH & BANGUNAN)

B. HARTA BERGERAK

a. ALAT TRANSPORTASI Rp. 5.500.000

DAN MESIN LAINNYA

1. Motor, merk YAMAHA, tahun pembuatan 1988, yang berasal dari HIBAH, perolehan tahun 1988 nilai jual Rp.500.000
2. Motor, merk HONDA BEAT, tahun pembuatan 2009, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2009 nilai jual Rp.5.000.000

b. PETERNAKAN, Rp. 0

PERIKANAN,

PERKEBUNAN,

PERTANIAN,

KEHUTANAN,

PERTAMBANGAN DAN

USAHA LAINNYA

c. HARTA BERGERAK Rp. 32.250.000

LAINNYA

1. LOGAM MULIA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1994 sampai dengan 2013 dengan nilai jual Rp.26.250.000
2. BENDA BERGERAK LAINNYA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2010 sampai dengan 2014 dengan nilai jual Rp.6.000.000

C. SURAT BERHARGA	Rp.	0
D. GIRO DAN SETARA KAS	Rp.	101.645.507
LAINNYA			
1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI dengan nilai Rp.91.860.431			
2. Yang berasal dari --- dengan nilai Rp.9.785.076			
E. PIUTANG	Rp.	0
TOTAL HARTA (II)	Rp.	139.395.507
III. HUTANG			
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II - III)	Rp.	139.395.507

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis

